



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor ...4.: Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp. 114.818.287.091,48
b. Dana Perimbangan		Rp. 866.039.389.648,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah		<u>Rp. 179.394.453.555,02</u>
Jumlah pendapatan		Rp1.160.252.130.294,50
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		Rp. 531.315.526.797,00
2) Belanja Bunga		Rp. 335.923.000,00
3) Belanja Subsidi		Rp. 606.744.000,00
4) Belanja Hibah		Rp. 6.409.600.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial		Rp. 5.335.750.000,00
6) Belanja Bagi Hasil		Rp. 1.146.362.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan		Rp. 141.766.858.429,00
8) Belanja Tidak Terduga		<u>Rp. 0,00</u>
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>		Rp. 686.916.764.226,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		Rp. 99.388.830.430,00
2) Belanja Barang dan Jasa		Rp. 192.575.216.596,38
3) Belanja Modal		<u>Rp. 110.596.439.443,86</u>
<i>Jumlah Belanja Langsung</i>		<u>Rp. 402.560.486.470,24</u>
	Jumlah Belanja	Rp1.089.477.250.696,24
	Surplus/(Defisit)	Rp. 70.774.879.598,26
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		Rp. 15.261.158.531,17
b. Pengeluaran		<u>Rp. 52.004.880.717,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. (36.743.722.185,83)</u>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan</i>		Rp. 34.031.157.412,43

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Agustus 2017



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

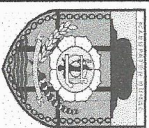
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR ...

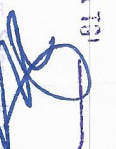


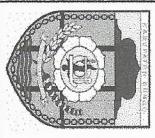
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (Rp)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.211.134.556,059,76	1.160.252.130.294,50	(50.884.324.429,26)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.883.203.009,90	114.818.287.091,48	(9.064.916.912,42)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25.678.611.800,00	27.553.390.324,50	1.874.778.524,50
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.147.776.947,50	3.796.149.293,00	(351.627.654,50)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.810.734.000,00	3.810.734.153,28	423,28
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.246.080.262,40	79.658.013.320,70	(10.587.966.941,70)
1.2	DANA PERIMBANGAN	897.651.719.423,62	866.039.389.648,00	(31.262.330.775,62)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	92.256.704.131,62	74.085.974.478,00	(18.170.729.653,62)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	163.759.990.292,00	150.318.390.170,00	(13.441.600.122,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.599.633.626,24	179.394.453.555,02	(10.205.180.071,22)
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.404.880.715,24	52.553.834.483,00	(850.946.232,24)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.807.802.911,00	38.991.340.072,02	(10.816.462.838,98)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.386.950.000,00	87.869.279.000,00	1.482.329.000,00
2	BELANJA	1.174.216.297.589,21	1.089.477.250.696,24	(84.739.041.292,97)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	737.656.666.628,64	686.916.764.226,00	(50.740.902.402,64)
2.1.1	Belanja Pegawai	566.211.764.629,64	531.315.526.797,00	(34.896.108.832,64)
2.1.2	Belanja Bunga	383.043.982,00	335.923.000,00	(47.120.982,00)
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.866.000.000,00	6.409.600.000,00	(1.456.400.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.335.750.000,00	5.335.750.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.146.362.000,00	1.146.362.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	155.917.002.017,00	141.766.858.429,00	(14.150.143.587,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	436.559.630.960,57	402.560.486.470,24	(33.973.144.490,33)
2.2.1	Belanja Pegawai	103.807.064.298,04	99.388.830.430,00	(4.418.234.868,04)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (Rp)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.220.680.534,99	192.575.216.596,38	(23.645.065.468,61)
2.2.3	Belanja Modal	116.531.886.127,54	110.596.439.443,86	(5.935.446.683,68)
	SURPLUS / (DEFISIT)	36.918.258.470,55	70.774.879.598,26	33.856.621.127,71
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.086.622.244,69	15.261.158.531,17	174.514.288,48
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.086.622.244,69	15.043.561.244,69	(242.060.999,00)
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	217.597.286,48	217.597.286,48
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	52.004.880.715,24	52.004.880.717,00	17,76
3.2.3	Penyertaan Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(36.918.258.470,55)	(36.743.722.185,83)	174.514.288,48
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	34.031.157.412,43	34.031.157.412,43

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBBAG PUU TGL	KABAG HUKUM TGL
 HAMBALI, SH NP 197604162402121005	 ALEK PURWENDI, SH, MH NP 1973072820060031003

TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETARIS/KABID KEPALA PADATIS 17/6/17 	BP KED PADATIS 
N. Rachmat, SH, MH NP 197207271992	



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 1.01		Usuran Wajib Pendidikan : 1.01.01					
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
		1	2	3	4	5	6
5	BELANJA						
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai						
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan						
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	366.364.896,284,64	341.023.939.590,00	(25.340.956.694,64)		93,08	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	336.117.915.049,64	313.682.787.802,00	(22.435.127.247,64)		93,33	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	336.117.915.049,64	313.682.787.802,00	(22.435.127.247,64)		93,33	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	216.818.859.763,64	207.228.995.962,00	(9.589.863.801,64)		95,58	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	165.037.164.194,00	162.039.124.200,00	(2.998.039.994,00)		98,18	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	16.055.036.995,64	14.586.956.765,00	(1.468.080.230,64)		90,86	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	506.111.200,00	427.155.000,00	(78.956.200,00)		84,40	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.151.662.750,00	13.695.712.000,00	(1.455.950.750,00)		90,39	
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.185.955.750,00	1.070.245.000,00	(115.710.750,00)		90,24	
5.1.00.00.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.619.207.519,00	8.355.095.400,00	(264.112.119,00)		96,94	
5.1.00.00.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	4.427.455.873,00	1.357.887.123,00	(3.069.568.750,00)		30,67	
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.909.074,00	2.035.968,00	(873.106,00)		69,99	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.680.953.892,00	4.567.366.510,00	(113.587.382,00)		97,57	
5.1.00.00.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	512.182.764,00	501.078.996,00	(11.103.768,00)		97,83	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	640.219.752,00	626.339.000,00	(13.880.752,00)		97,83	
5.1.00.00.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	119.299.055.286,00	106.453.791.840,00	(12.845.263.446,00)		89,23	
5.2	BELANJA LANGSUNG						
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa						
		30.246.981.235,00	27.341.151.788,00	(2.905.829.447,00)		90,39	
		11.894.861.600,00	11.177.142.922,00	(717.718.678,00)		93,97	
		15.645.000,00	13.396.000,00	(2.249.000,00)		85,62	
		15.645.000,00	13.396.000,00	(2.249.000,00)		85,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMILAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.810.000,00	22.808.477,00	(1.523,00)	99,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.252.873.509,00)	(4.805.990.729,00)	446.882.780,00	91,49

WASUP BUNGO
H. APRI, S.Pd

BUPATIN
H. MAS